

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Peranan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif merupakan jalan bagi suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhan dimasa yang akan datang (Nuryanta, 2008:60). Dengan kata lain, keberhasilan atau kemunduran suatu organisasi tergantung pada keahlian dan keterampilan pegawainya masing-masing yang bekerja di dalamnya.

Pegawai negeri sipil merupakan sumber daya manusia aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyeleggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada pancasila dan Undang-Undang 1945 (Thoha ,2007:64).

Kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil di Indonesia dirasakan semakin penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang madani yang taat akan hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi.

Kedudukan dan peranannya yang penting menyebabkan pegawai negeri sipil senantiasa dituntut supaya memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh dalam

menjalankan tugas-tugasnya dan memusatkan seluruh perhatian serta megerahkan segala daya dan tenaga secara berdaya guna dan berhasil guna (Akmaluddin, 2008:43).

Disiplin pada hakikatnya merupakan pencerminan nilai kemandirian yang dihayati dan diamalkan oleh setiap individu dan masyarakat suatu bangsa dalam berkehidupan. Untuk membina pegawai negeri sipil yang memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh, telah dikeluarkan peraturan tentang disiplin pegawai negeri, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yang isinya menjelaskan kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Dengan ditetapkannya peraturan tentang disiplin kerja bagi pegawai negeri sipil akan menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka, karena kedisiplinan merupakan kunci atau pra syarat bagi suksesnya pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan oleh organisasi. Maka, untuk menjamin terlaksananya seluruh tugas-tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh organisasi tersebut, kesiapan seluruh pegawai baik itu dalam kemampuan maupun kemauan yang tinggi sangat diharapkan didalam melaksanakan seluruh kegiatan organisasi serta menuntut adanya kedisiplinan yang tinggi dari para pegawai. Karena tanpa kedisiplinan akan timbul berbagai macam alternatif yang mengancam terealisasinya tujuan yang hendak dicapai organisasi (Habe, 2012: 02).

Pegawai negeri sipil harus dapat memeriksa secara sadar dan menganggap sikap disiplin kerja tersebut sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya. Hal juga

berlaku bagi seluruh pegawai negeri sipil di kantor pelayanan pajak pratama Kepanjen. Pegawai negeri sipil dituntut memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kerja atau peraturan (Mangkunegara, 2005:131).

Sistem pengawasan yang baik sangat penting dan berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. Pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disiplin kerja. Pengawasan dianggap sebagai salah satu alternatif yang berhubungan dengan pencegahan dan tindakan bagi pegawai negeri sipil yang melanggar peraturan disiplin (Ahadiningsih,2008:13).

Fabanyo (2011:86) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa suatu pengawasan belum bisa berjalan dengan efektif apabila belum adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum terkoordinasinya sistem pada pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas. Pernyataan ini diperkuat oleh Sari (2011:94) dalam penelitiannya bahwa disiplin kerja pegawai pada suatu organisasi tidak akan maksimal ketika fungsi pengawasan belum diterapkan secara maksimal.

Sule dan Saefullah (2008:317) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan apa yang semestinya atau tidak. Dengan adanya pengawasan diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang dilakukan oleh para pegawai sehingga mengurangi kesalahan dan penyimpangan yang terjadi.

Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa peranan pengawasan adalah sesuatu hal yang sangat essential dan tidak dapat diabaikan. Karena, pada hakikatnya pengawasan adalah suatu usaha untuk mendeteksi kegiatan yang dilakukan oleh pegawai apakah kegiatan tersebut telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta untuk menilai pegawai dalam hal ketaatannya dan mematuhi kebijakan-kebijakan yang berlaku.

Pengawasan adalah kewajiban setiap atasan untuk mengatasi setiap bawahannya yang bersifat preventif dan pembinaan, untuk menciptakan aparatur yang lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa terutama dalam menanggulangi masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara. Sehingga pimpinan dapat mengetahui kegiatan-kegiatan nyata dari setiap aspek serta permasalahan pelaksanaan-pelaksanaan tugas dalam lingkungan suatu organisasi masing-masing yang selanjutnya apabila terjadi penyimpangan, dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan tindakan seperlunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Glendoh, 2000 : 46).

Dalam pengamatan penulis yang diperoleh dari keterangan beberapa pegawai negeri sipil yang bekerja disetiap divisi, sistem pengawasan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Kepanjen kurang berjalan efektif. Padahal berdasarkan suara responden 51% pegawai negeri sipil pajak mempunyai citra disiplin baik (Dini, 2005:02).

Namun, pada kenyataannya masih banyaknya pegawai yang kurang disiplin, seperti masih adanya pegawai yang terlambat, pegawai yang keluar pada

saat jam efektif kerja, main game internet ketika jam kerja, istirahat sebelum waktunya, dan keluar masuk kantor tanpa ijin pemimpin. Hal inilah yang mencerminkan bahwa pegawai negeri sipil yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Kepanjen tidak menganggap penting disiplin kerja yang seharusnya ditaati dan patuhi. Tindakan kurang disiplin dapat mengakibatkan pekerjaannya tidak efektif dan efisien, hal itu akan mempengaruhi terrealisasinya suatu tujuan organisasi (Jono,2009: 663)

Dari uraian diatas, maka untuk memperkecil atau mengurangi ruang gerak dari permasalahan tersebut maka setiap pemimpin satuan organisasi harus jeli melihat pentingnya sistem pengawasan dalam merealisasikan tujuan organisasi, Berdasarkan dari uraian diatas penulis memilih tugas akhir dengan judul : **“Sistem Pengawasan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen”**

1.2. Rumusan Masalah

“Bagaimana sistem pengawasan pegawai negeri sipil yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui sistem pengawasan pegawai negeri sipil yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna dalam hal :

- a. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.
- c. Sebagai bahan tambahan referensi untuk penulisan yang relevan.